

PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2021, 34 HLM

2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disertai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - Perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka diperlukan payung hukum yang mengatur pedoman teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah;
- CATATAN :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2022.